

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Implementasi Strategi BARONDA (Bapenda Road to Optimalisasi Pendapatan Daerah) terhadap Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kupang*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Sebelum strategi BARONDA diterapkan, pemungutan pajak daerah di Kota Kupang masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti ketidakteraturan administrasi, keterbatasan data objek pajak, serta rendahnya konsistensi pencapaian target penerimaan. Setelah BARONDA diimplementasikan, terjadi perbaikan signifikan dalam pola kerja pemungutan pajak, yang ditandai dengan meningkatnya rasio realisasi terhadap target, perbaikan sistem pendataan, serta meningkatnya disiplin administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa BARONDA tidak hanya berfungsi sebagai program teknis, tetapi sebagai instrumen strategis yang mampu memperkuat kinerja pemungutan pajak daerah secara lebih efektif, sistematis, dan berorientasi pada hasil.
2. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah dalam kerangka BARONDA dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor pendukung, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kualitas sumber daya manusia aparatur Bapenda, penguatan kapasitas kelembagaan, serta

pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pengawasan pajak menjadi faktor dominan yang mendorong peningkatan efektivitas. Aparatur yang lebih kompeten dan sistem digital yang semakin terintegrasi memungkinkan proses pemungutan berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Dari sisi eksternal, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dukungan lingkungan sosial, serta karakteristik ekonomi lokal Kota Kupang turut berkontribusi terhadap keberhasilan strategi BARONDA. Interaksi positif antara faktor-faktor tersebut menciptakan ekosistem pemungutan pajak yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

3. Strategi BARONDA berperan signifikan dalam mengatasi berbagai kendala administratif, teknis, dan sosial yang selama ini menghambat efektivitas pemungutan pajak daerah. Melalui penerapan empat aspek strategis BARONDA, yakni bauran, oportunitas, responsif, dan akuntabilitas, Bapenda Kota Kupang mampu melakukan transformasi dalam pengelolaan pajak daerah. Kendala administratif seperti lemahnya basis data dan prosedur yang berbelit dapat diminimalkan melalui integrasi sistem dan penyederhanaan layanan. Kendala teknis, termasuk keterbatasan pengawasan dan pemantauan, dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan analisis data. Sementara itu, kendala sosial berupa rendahnya kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak mulai teratasi melalui pendekatan komunikasi yang lebih persuasif, transparan, dan partisipatif.

4. Implementasi strategi BARONDA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemungutan pajak daerah dan mendorong peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam strategi BARONDA tidak hanya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola pemungutan pajak yang lebih baik mendorong terciptanya hubungan fiskal yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, BARONDA dapat dipandang sebagai bagian dari reformasi fiskal lokal yang berorientasi pada penguatan kemandirian fiskal daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah Kota Kupang dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang dan Bapenda Kota Kupang, disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan strategi BARONDA secara berkelanjutan, khususnya dalam hal penguatan basis data wajib pajak, integrasi sistem digital perpajakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pajak daerah perlu menjadi prioritas melalui pelatihan teknis, penguatan kompetensi digital, dan pembinaan integritas aparatur. Aparatur yang profesional dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan persuasif dan komunikatif yang menekankan manfaat pajak bagi pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
4. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu terus dilakukan, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih rinci dampak implementasi strategi BARONDA terhadap peningkatan PAD. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan wilayah atau membandingkan strategi serupa di daerah lain sebagai bahan pengayaan kajian kebijakan fiskal lokal.